

► KEGIATAN KAMPUS

UMY Kritik Pelaksanaan UU Keistimewaan

JOGJA—Masyarakat Yogyakarta dinilai kurang puas dengan pelaksanaan keistimewaan DIY, terutama dalam penggunaan dana keistimewaan. Dana keistimewaan dianggap lebih banyak digunakan untuk acara budaya bersifat insidental yang tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat DIY.

Hal itu didasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Ane Permatasari, dalam diskusi awal tahun UMY, di ruang sidang A.R. Fakhruddin A., Sabtu (31/1).

Penelitian yang berjudul *Evaluasi Pelaksanaan Keistimewaan DIY*, berdasarkan data 400 responden dari lima kabupaten/kota, sebanyak 32% responden yang mengetahui penggunaan dana keistimewaan dan kurang dari 50% responden yang yakin bahwa dana keistimewaan mampu mempercepat pembangunan di DIY.

"Data ini memberi gambaran kinerja satuan kerja perangkat daerah [SKPD] dalam menyosialisasikan dana keistimewaan masih kurang optimal. Selain itu juga capaian pemerintah dalam pembangunan yang belum sesuai harapan masyarakat," jelas Ane.

Pihaknya juga menunjukkan sebanyak 58% responden yakin adanya keistimewaan akan memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat, dinilai masih rendah meski relevan dengan penurunan angka kemiskinan DIY pada triwulan pertama dan ketiga tahun 2014. Meskipun demikian, dukungan masyarakat terhadap Sri Sultan Hamengku Buwono ke X sebagai gubernur masih menduduki angka yang tinggi, yakni 91%.

Menanggapi hasil evaluasi dan *monitoring* dari UMY itu, pengamat hukum sekaligus mantan anggota DPRD DIY, Istiana Zaenal Asikin, menegaskan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta (UUKY) belum berdampak pada kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat.

Kewenangan

Menurut dia, tujuan dengan substansi lima kewenangan yakni tata cara penetapan, kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang, belum sinkron. "Lima kewenangan ini kalau dikaitkan dengan kesejahteraan masyarakat susah disambungkan. Kalau menenteramkan sih iya," kata Istiana.

Sedangkan untuk dana keistimewaan (danais), pihaknya berpendapat faktor yang menyebabkan masyarakat belum memahami danais adalah aturan tentang mendapatkan dan mengelola dana yang terlalu rumit.

"Faktor lain juga keterlambatan pencairan danais, sosialisasi tidak maksimal, dan Pemda DIY saat merumuskan UU untuk dibawa ke Jakarta tidak melibatkan DPRD," kata dia kepada wartawan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPD, G.K.R. Hemas yang turut hadir dalam seminar tersebut mengatakan para peneliti maupun akademisi seharusnya juga melibatkan para *stakeholder* lain seperti SKPD dan DPRD.

Menurut dia, proses persiapan pembuatan UUKY termasuk bentuk partisipasi DPRD dan SKPD juga menjadi pertimbangan untuk melakukan *monitoring* pelaksanaan UUKY. (Bernadetha Dian Saraswati/JIBI)